

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga seluruh rangkaian proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memuat data dan informasi berupa Indikator Kinerja Kunci baik *Outcome* maupun *Output* yang berasal dari perangkat daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah serta hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Takalar dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Takalar pada masa yang akan datang.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Takalar, Maret 2025

BUPATI TAKALAR,



Ir. H. MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, RPD Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2024, serta dokumen-dokumen terkait capaian kinerja dari Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Takalar.

LPPD Kabupaten Takalar memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi Capaian Kinerja Makro, Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten, dan tugas pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Daerah di bawahnya, serta menyampaikan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Takalar.

LPPD Kabupaten Takalar disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian LPPD dilaksanakan melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) secara daring.

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Takalar sebelumnya berada dalam Daerah Makassar, daerah Swatantra yang wilayahnya meliputi Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Je'nepono, Takalar dan sebuah onderafdeling Pulau-pulau Makasar, Yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra (Lembaran Negara tahun 1952 No. 48).

Tahun 1957, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 2) tentang pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar, di mana Onderafdeling Takalar dan Onderafdeling Jeneponto dibubarkan dan ditetapkan menjadi Daerah Jeneponto-Takalar, mempunyai tingkatan yang sama dengan Kabupaten.

Untuk mempercepat perkembangan pemerintahan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Tahun 1959, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (lembar Negara Nomor 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi, membubarkan daerah Je'nepono-Takalar. Bagian Daerah Jeneponto-Takalar tersebut yang meliputi

Onderafdeling Takalar dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Takalar dan berkedudukan di Takalar.

Tahun 2024, berdasarkan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ditetapkan Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pembangunan Kabupaten Takalar diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan.

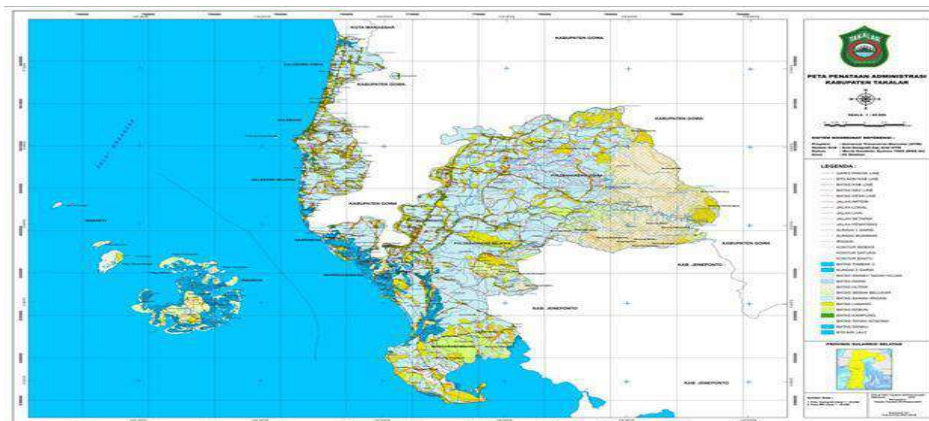
b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi Daerah

Secara astronomis, Kabupaten Takalar terletak antara 5° 30' – 5° 38' Lintang Selatan dan 119° 22' – 119° 39' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Takalar memiliki batas – batas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Gambar 1.1.
Peta Administratif Kabupaten Takalar



Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Takalar

2. Luas Wilayah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Luas Wilayah Indikatif Kabupaten Takalar adalah 555 km². Sedangkan menurut publikasi BPS Takalar Dalam Angka 2025, luas wilayah kabupaten Takalar tercatat 566,51 km². Kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel. 1.2 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Mangarabombang	33,28
2	Mappakasunggu	15,12
3	Sanrobone	29,36
4	Polongbangkeng Selatan	88,07
5	Pattallassang	25,31
6	Polongbangkeng Utara	56,51
7	Galesong	25,93
8	Galesong selatan	24,71
9	Galesong Utara	15,11
10	Kepulauan Tanakeke	30,15
11	Polongbangkeng Timur	155,74
12	Laikang	67,21
Jumlah		566,51

Sumber: Takalar Dalam Angka 2025; Perda No. 1 Tahun 2022; Perda No. 2 Tahun 2022

3. Geologi

Struktur geologi Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh formasi camba, terobosan, gunung api cindako, formasi tonasa dan endapan aluvium. Masing masing formasi batuan tersebut memiliki karakteristik yang membentuk struktur tanah dan batuan, antara lain :

- Formasi Terobosan, terbentuk atas batuan basal
- Formasi Camba terbentuk atas sendimen laut berselingan
- Formasi Tonasa terbentuk atas batuan gamping
- Formasi Gunung Api–Cindako, terbentuk atas batuan lava-breksitufa-konglomerat dan terutama lava
- Endapan *alivium* dan pantai, terbentuk atas kerikil, pasir, lempung, dan lumpur

Jenis batuan atau geologi Kabupaten Takalar terdiri dari; *Vulcanic* (batuan Vulkanik), batuan ini merupakan batuan tertua yang telah mengalami perubahan, sebagian besar batu kapur terbentang sepanjang pantai perbatasan Takalar dengan Jeneponto. Gunung Api Baturape – Cindako merupakan batuan vulkanik basal yang terdiri dari lava dan batuan *piroklastik* yang bersilangan dengan tufa dan batu pasir. Batuan ini tersebar luas di wilayah pegunungan dan daerah dataran, Lapisan batuan ini memiliki *porositas* dan *permeabilitas* yang rendah. Batuan *Instrusif* terdiri atas batuan basal mulai dari *dolerit*, *diorit*, *gabbro* hingga *diabase* (RPD Tahun 2023-2026).

4. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kabupaten Takalar berada pada ketinggian 0 – 64 meter diatas permukaan laut (*mdpl*), dengan bentuk permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah dataran dan wilayah pesisir dengan ketinggian 0 – 44 *mdpl* (RPD Tahun 2023-2026).

5. Hidrologi

Secara Hidrologi, Kabupaten Takalar dilewati oleh 6 (enam) buah Daerah Aliran Secara Hidrologi, Kabupaten Takalar dilewati oleh 6 (enam) buah Daerah Aliran Sungai (DAS),

yaitu Sungai Je'neberang, Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Je'netallasa, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je'nemarrung. 4 (empat) diantara 6 (enam) sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha, yaitu Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je'nemarrung (RPD Tahun 2023-2026).

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menggambarkan potensi suatu daerah. Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan data Laporan Perkembangan penduduk Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tahun 2023 sebesar 326.044 jiwa bertambah di tahun 2024 menjadi 332.863 jiwa. Komposisi penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Komposisi Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Tabel berikut menunjukkan Laju Pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kabupaten Takalar per kecamatan tahun 2024:

Tabel. 1.3 Proporsi Penduduk Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK TAHUN SEKARANG		PENDUDUK TAHUN SEBELUMNYA	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		N (JIWA)	(%)	N (JIWA)	(%)
	N (JIWA)	(%)	N (JIWA)	(%)				
MAPPAKASUNGGU	5.119	1,55	5.429	1,65	10.548	3,20	10.477	3,21
MANGARABOMBANG	11.803	3,58	12.257	3,71	24.060	7,29	23.734	7,28
POLONGBANGKENG SELATAN	15.073	4,57	16.300	4,94	31.373	9,51	31.061	9,53
POLONGBANGKENG UTARA	16.437	4,98	17.424	5,28	33.861	10,26	33.559	10,29
GALESONG SELATAN	14.753	4,47	15.248	4,62	30.001	9,09	29.533	9,06
GALESONG UTARA	22.392	6,79	22.946	6,95	45.338	13,74	44.609	13,68
PATTALLASSANG	20.402	6,18	21.562	6,53	41.964	12,72	41.628	12,77
SANROBONE	8.285	2,51	8.951	2,71	17.236	5,22	17.094	5,24
GALESONG	22.505	6,82	23.045	6,98	45.550	13,80	45.035	13,81
KEPULAUAN TANAKEKE	4.015	1,22	3.928	1,19	7.943	2,41	7.810	2,40
POLONGBANGKENG TIMUR	10.093	3,06	10.475	3,17	20.568	6,23	20.334	6,24
LAIKANG	10.614	3,22	10.941	3,32	21.555	6,53	21.170	6,49
KAB. TAKALAR	161.491	48,94	168.506	51,06	329.997	100	326.044	100,00

Sumber: Buku Penduduk Semester II 2024 Dinas Capil dan Kependudukan

Tabel di atas menunjukkan sebaran penduduk Kabupaten Takalar menurut kecamatan. Jumlah penduduk terbesar per kecamatan di Kabupaten Takalar tahun 2024 berada di Kecamatan Galesong dengan jumlah penduduk mencapai 45.550 jiwa

Tabel. 1.4 Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Pemerintah Kabupaten Takalar

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	(%)
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)		
00-04	13.709	4,12	12.816	3,85	26.525	7,97
05-09	15.940	4,79	14.988	4,50	30.928	9,29
10-14	15.328	4,60	14.314	4,30	29.642	8,91
15-19	12.331	3,70	12.072	3,63	24.403	7,33
20-24	14.083	4,23	14.137	4,25	28.220	8,48
25-29	12.632	3,79	12.664	3,80	25.296	7,60
30-34	12.120	3,64	12.165	3,65	24.285	7,30
35-39	11.385	3,42	11.751	3,53	23.136	6,95
40-44	10.879	3,27	12.044	3,62	22.923	6,89
45-49	10.444	3,14	11.597	3,48	22.041	6,62
50-54	9.662	2,90	10.695	3,21	20.357	6,12
55-59	8.131	2,44	9.524	2,86	17.655	5,30
60-64	6.221	1,87	7.349	2,21	13.570	4,08
65-69	4.157	1,25	5.026	1,51	9.183	2,76
70-74	2.710	0,81	3.295	0,99	6.005	1,80
>=75	3.165	0,95	5.529	1,66	8.694	2,61
Jumlah	162.897	48,94	169.966	51,06	332.863	100,00

Sumber: Buku Penduduk Semester II 2024 Dinas Capil dan Kependudukan

d. Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Kabupaten Takalar.

Tahun 2024, Kabupaten Takalar terdiri atas 12 wilayah kecamatan, 86 Desa, dan 24 Kelurahan. Tahun 2022 Kabupaten Takalar telah membentuk 2 (dua) kecamatan baru yaitu Kecamatan Polongbangkeng Timur yang merupakan pemekaran sebagian wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 dan Kecamatan Laikang yang merupakan pemekaran sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang sesuai Peraturan daerah Kabupaten Takalar No. 2 Tahun 2022. Kecamatan Polongbangkeng Timur dan Kecamatan Laikang saat ini masih dalam tahap pembentukan lembaga.

Pembagian wilayah administratif kabupaten Takalar dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. I.5 : Pembagian Wilayah Administrasi Kab. Takalar Berdasarkan Kode Wilayah

No	Kecamatan	Kode Wilayah	Desa	Kel.	Keterangan
1	Mappakasunggu	73.05.01	3	1	
2	Mangarabombang	73.05.02	5	1	
3	Polongbangkeng Selatan	73.05.03	5	6	
4	Polongbangkeng Utara	73.05.04	4	6	
5	Galesong Selatan	73.05.05	13	-	
6	Galesong Utara	73.05.06	13	1	
7	Pattallassang	73.05.07	-	9	
8	Sanrobone	73.05.08	6	-	
9	Galesong	73.05.09	17	-	
10	Kepulauan Tanakeke	73.05.10	6	-	

Pemerintah Kabupaten Takalar

11	Polongbangkeng Timur	73.05.11	8	-	Tahap Pembentukan Lembaga
12	Laikang	73.05.12	6		Tahap Pembentukan Lembaga
Jumlah			86	24	

Sumber: Bag. Pemerintahan Setda Kab. Takalar/Dinas Sosial, PMD Kab. Takalar

e. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Takalar

Susunan perangkat daerah tahun 2024 berdasar pada Perda No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Perda Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun perubahan jumlah, nama dan tipe Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel. I.6 : **Jumlah dan Nomenklatur OPD Pemerintah Kabupaten Takalar**

NO	Nama OPD	Dasar Hukum
1.	Sekretariat Daerah	Perda No. 3 Tahun 2024
2.	Sekretariat DPRD	Perda No. 3 Tahun 2024
3.	Inspektorat	Perda No. 3 Tahun 2024
Dinas Daerah		
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perda No. 3 Tahun 2024
5.	Dinas Kesehatan	Perda No. 3 Tahun 2024
6.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perda No. 3 Tahun 2024
7.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Perda No. 3 Tahun 2024
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perda No. 3 Tahun 2024
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Perda No. 3 Tahun 2024
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda No. 3 Tahun 2024
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Perda No. 3 Tahun 2024
12.	Dinas Perhubungan	Perda No. 3 Tahun 2024
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Perda No. 3 Tahun 2024
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perda No. 3 Tahun 2024
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda No. 3 Tahun 2024
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perda No. 3 Tahun 2024
17.	Dinas Perikanan	Perda No. 3 Tahun 2024
18.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Perda No. 3 Tahun 2024
19.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Perda No. 3 Tahun 2024
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perda No. 3 Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Takalar

21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Perda No. 3 Tahun 2024
Badan Daerah		
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Perda No. 3 Tahun 2024
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perda No. 3 Tahun 2024
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perda No. 3 Tahun 2024
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda No. 3 Tahun 2024
26.	Badan Pendapatan Daerah	Perda No. 3 Tahun 2024
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Kecamatan		
28.	Kecamatan Pattallassang	Perda No. 3 Tahun 2024
29.	Kecamatan Polongbangkeng Utara	Perda No. 3 Tahun 2024
30.	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	Perda No. 3 Tahun 2024
31.	Kecamatan Mangarabombang	Perda No. 3 Tahun 2024
32.	Kecamatan Mappakasunggu	Perda No. 3 Tahun 2024
33.	Kecamatan Sanrobone	Perda No. 3 Tahun 2024
34.	Kecamatan Galesong Selatan	Perda No. 3 Tahun 2024
35.	Kecamatan Galesong Utara	Perda No. 3 Tahun 2024
36.	Kecamatan Galesong	Perda No. 3 Tahun 2024
37.	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	Perda No. 3 Tahun 2024
38.	Kecamatan Polongbangkeng Timur	Perda No. 3 Tahun 2024
39.	Kecamatan Iaikang	Perda No. 3 Tahun 2024

Sumber : JDIH Bag. Hukum Setda Kab. Takalar (Perda No. 3 Tahun 2024)

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Takalar, jumlah PNS dan PPPK Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2024 berjumlah 4.568 orang yang terdiri dari 4273 orang Pegawai negeri Sipil serta 295 orang PPPK.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.7 : Jumlah PNS dan PPPK Tahun 2024

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4.2739
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	295
JUMLAH	4.568

Sumber: BPSDM Kab Takalar 2025

Pemerintah Kabupaten Takalar

- f. Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berdasarkan data *unaudit* realisasi APBD Kabupaten Takalar tahun 2024 Laporan Realisasi APBD sampai dengan 31 Desember 2024 dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.9.

Tabel. 1.8 : **LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	38.771.600.000,00	26.192.258.561,35	12.579.341.438,65	67,56	28.554.654.625,60
4	Pendapatan Retribusi Daerah	47.624.000.000,00	2.265.188.340,00	45.358.811.660,00	4,76	2.552.794.394,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.000.000.000,00	10.097.366.422,00	3.902.633.578,00	100,00	10.159.541.102,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	123.165.000.000,00	107.624.654.101,37	15.540.345.898,63	111,63	101.869.885.187,59
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	223.560.600.000,00	146.179.467.424,72	77.381.132.575,28	65,39	143.136.875.309,19
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	8.021.423.000,00	7.973.990.200,00	47.432.800,00	99,41	8.459.335.000,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.188.101.000,00	4.188.101.000,00	-	100,00	4.073.753.000,00
13	Dana Alokasi Umum	621.509.815.000,00	634.554.049.000,00	(13.044.234.000,00)	102,10	589.369.151.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	239.342.428.766,00	236.684.819.468,00	2.657.609.298,00	98,89	253.589.811.532,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	873.061.767.766,00	883.400.959.668,00	(10.339.191.902,00)	101,18	855.492.050.532,00
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	90.651.640.000,00	87.227.956.600,00	3.423.683.400,00	96,22	73.734.414.000,00

Pemerintah Kabupaten Takalar

20	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya	90.651.640.000,00	87.227.956.600,00	3.423.683.400,00	96,22	73.734.414.000,00
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.749.269.365,00	54.228.031.284,00	(6.478.761.919,00)	113,57	67.541.468.990,36
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
25	Bantuan Keuangan	8.290.452.716,00	7.812.465.800,00	477.986.916,00	94,23	18.468.267.438,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	56.039.722.081,00	62.040.497.084,00	(6.000.775.003,00)	110,71	86.009.736.428,36
27	Total Pendapatan Transfer	1.019.753.129.847,00	1.032.669.413.352,00	(12.916.283.505,00)	101,27	1.015.236.200.960,36
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
30	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
31	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
32	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	70.289.123,00
33	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	-	-	-	-	70.289.123,00
34						
35	JUMLAH PENDAPATAN	1.243.313.729.847,00	1.178.848.880.776,72	64.464.849.070,28	94,82	1.158.443.365.392,55
36						
37	BELANJA					
38	BELANJA OPERASI					
39	Belanja Pegawai	559.333.477.718,86	526.206.586.984,00	33.126.890.734,86	94,08	514.823.031.783,00
40	Belanja Barang	332.608.114.667,60	310.112.824.212,81	22.495.290.454,79	93,24	311.907.154.700,76
41	Belanja Bunga	14.326.084.888,00	14.326.084.888,00	-	100,00	14.677.054.618,00
42	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
43	Belanja Hibah	44.846.374.930,00	43.219.141.231,00	1.627.233.699,00	96,37	17.888.706.020,00
44	Belanja Bantuan Sosial	1.700.600.000,00	1.667.600.000,00	33.000.000,00	98,06	-
45	Jumlah Belanja Operasi	952.814.652.204,46	895.532.237.315,81	57.282.414.888,65	93,99	859.295.947.121,76
46						

Pemerintah Kabupaten Takalar

47	BELANJA MODAL					
48	Belanja Tanah	2.171.476.925,00	2.138.361.440,00	33.115.485,00	98,47	2.136.024.040,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin	38.516.318.337,00	34.609.720.475,00	3.906.597.862,00	89,86	32.589.122.568,00
50	Belanja Gedung dan Bangunan	47.977.309.489,00	46.263.878.562,00	1.713.430.927,00	96,43	68.051.332.304,00
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.864.464.788,00	50.388.636.979,00	2.475.827.809,00	95,32	84.152.969.760,00
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	319.800.000,00	318.165.000,00	1.635.000,00	99,49	1.083.200.000,00
53	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
54	Jumlah Belanja Modal	141.849.369.539,00	133.718.762.456,00	8.130.607.083,00	94,27	188.012.648.672,00
55						
56	BELANJA TAK TERDUGA					
57	Belanja Tak Terduga	4.923.226.492,00	-	4.923.226.492,00	-	3.119.789.584,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga	4.923.226.492,00	-	4.923.226.492,00	-	3.119.789.584,00
59						
60	TRANSFER					
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
62	Bagi Hasil Pajak	1.055.635.300,00	1.055.626.300,00	9.000,00	100,00	-
63	Bagi Hasil Retribusi	1.944.364.700,00	1.944.364.700,00	-	100,00	2.163.769.000,00
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
65	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	3.000.000.000,00	2.999.991.000,00	9.000,00	100,00	2.163.769.000,00
66						
67	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN					
68	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	63.301.380.000,00	63.301.380.000,00	-	100,00	-
69	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi	40.370.100,00	-	40.370.100,00	-	-
70	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	78.203.364.000,00	77.003.166.069,00	1.200.197.931,00	98,47	128.256.381.100,00
71	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	141.545.114.100,00	140.304.546.069,00	1.240.568.031,00	99,12	128.256.381.100,00
72						

Pemerintah Kabupaten Takalar

73	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.244.132.362.335,46	1.172.555.536.840,81	71.576.825.494,65	94,25	1.180.848.535.477,76
74						
75	SURPLUS/DEFISIT	(818.632.488,46)	6.293.343.935,91	(7.111.976.424,37)	(768,76)	(22.405.170.085,21)
76	PEMBIAYAAN					
77	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
78	Penggunaan SILPA	23.954.336.606,46	23.950.150.896,52	4.185.709,94	99,98	54.967.766.416,73
79	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
80	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
81	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0,00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0	0
84	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0	0
85	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	0	0	0	0
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0	0	0	0	0
87	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0	0	0	0	0
88	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
89	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
90	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	23.954.336.606,46	23.950.150.896,52	4.185.709,94	99,98	54.967.766.416,73
91						
92	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
93	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
94	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah	23.135.704.118,00	20.026.099.950,00	3.109.604.168,00	86,56	8.608.845.435,00

Pemerintah Kabupaten Takalar

	Pusat					
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0	0
98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0	0
99	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	0	0	0	0
100	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0	0	0	0	0
101	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0	0	0	0	0
102	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0	0	0	0	0
103	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
104	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.135.704.118,00	20.026.099.950,00	3.109.604.168,00	86,56	8.608.845.435,00
105						
106	PEMBIAYAAN NETTO	818.632.488,46	3.924.050.946,52	(3.105.418.458,06)	479,34	46.358.920.981,73
107						
108	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	10.217.394.882,43	(10.217.394.882,43)	0	23.953.750.896,52

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

➤ **Permasalahan Pembangunan Untuk Penentuan Prioritas Daerah**

kebijakan pembangunan dalam rencana pembangunan mendatang dijabarkan dalam permasalahan pokok sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya peningkatan kapasitas Daya Saing Daerah secara berkelanjutan;
- b) Pertumbuhan Ekonomi inklusif yang berkelanjutan belum optimal;
- c) Tata Kelola pemerintahan masih rendah (RPD-P 2023-2026).

- Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**
- Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, maka disusun agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Berdasarkan arah kebijakan setiap tahun berdasarkan sasaran RPD, maka tema pembangunan yang dijadikan acuan dalam perumusan prioritas pembangunan daerah untuk setiap tahun dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Tahun 2023:
Akselerasi pembangunan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar.
 2. Tahun 2024:
Penguatan demokrasi dan partisipasi politik serta ketertiban.
 3. Tahun 2025:
Pemantapan infrastruktur wilayah, daya saing ekonomi dan pelayanan dasar.
 4. Tahun 2026:
Pemantapan perekonomian, daya saing daerah dan pembangunan manusia.

c. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Program Prioritas daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025 serta tujuan dan sasaran RPD. Selain itu, berdasarkan arahan Permendagri 86 Tahun 2017, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan, antara lain:

Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

1. Pencapaian SDGs.
2. Pengentasan kemiskinan.
3. Pencapaian NSPK dan SPM.
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
5. Pengembangan daerah terisolir.

Selain pertimbangan diatas, program prioritas Kabupaten Takalar juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia.
2. Penguatan Infrastruktur Wilayah.
3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja.
4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi.
5. Pelestarian Lingkungan Hidup.
6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor.

Program prioritas daerah Kabupaten Takalar merupakan upaya menjawab isu-isu pembangunan daerah melalui pelaksanaan pembangunan, khususnya pada kegiatan yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program prioritas daerah dimaksudkan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Tujuan Pembangunan Nasional melalui sinergitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan menerapkan prinsip kolaborasi sumber pendanaan yaitu APBN, APBD, KPBU, dan Swasta.

Program prioritas daerah Kabupaten Takalar merupakan sinergitas antara arahan pembangunan kewilayahan dan proyek prioritas Nasional (Major Project) dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Pelaksanaan program prioritas daerah, indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RPD dan RKPD dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan guna memastikan prioritas pembangunan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan (RPD Tahun 2023-2026).

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah Urusan Pemerintahan Absolut dan ada Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, di mana Urusan Pemerintahan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait pelayanan dasar.

Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Terkait dengan substansi pelayanan dasar, Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib. Di mana, pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah dan teknis penerapannya yang mengatur Jenis Pelayanan dan Mutu Pelayanan melalui Peraturan Menteri.

Substansi pelayanan Dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan diprioritaskan bagi warga Negara yang berhak untuk memperoleh pelayanan dasar tersebut. Jenis pelayanan Dasar yang berhak untuk diperoleh antara lain : pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; pendidikan kesetaraan; pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar disesuaikan dengan Standar Teknis yang diatur oleh Kementerian Teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar.

Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut di atas merupakan perwujudan upaya pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan. Tujuan Penerapan Standar Pelayanan Minimal juga sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

a. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang – Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3173);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan Kebakaran Daerah kabupaten/kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BN.2021/No.1419);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (BN.2022/No.677);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 15. Perda Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 03);

18. Peraturan Bupati Takalar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 04);
19. Perda Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025;

b. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan agar pemerintah daerah lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan tahunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD ini. Rangkaian prioritas tahunan tersebut memiliki sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain dalam mencapai sasaran RPD. Rumusan arah kebijakan ini juga merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus. Arah kebijakan pembangunan RPD Kabupaten Takalar 2023-2026 pada dasarnya berisi prioritas pembangunan yang akan dijalankan setiap tahun. Setiap tahun akan dijalankan tema pembangunan tertentu, dan dalam payung tema pembangunan itu dikembangkan arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 dalam RPD Kabupaten Takalar 2023-2026 berada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yaitu Akselerasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro tersebut antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, Dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Secara lengkap, capaian Kinerja Makro menggunakan indikator capaian kinerja makro serta perubahannya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Takalar Tahun 2023/2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N (2023)	Capaian Kinerja Tahun N (2024)	Laju Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,46	72,06	0.84%
2	Angka Kemiskinan	8,29	7,75	-6,514%
3	Angka Pengangguran	3,58	3,84	7,263%
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,86	4,34	12,435%
5	Pendapatan Per Kapita	41,14	42,36	2,965%
6	Gini Ratio	0,365	0,365	0

Sumber: BPS Publikasi Takalar Dalam Angka 2025 & Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulsel Triwulan IV 2024.

a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini.

Berdasarkan kriteria UNDP, nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sebagai IPM sedang, nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM di atas 79 (> 79) digolongkan tinggi. Maka dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, nilai IPM Kabupaten Takalar sebesar **72,06** pada tahun 2024, maka IPM Kabupaten Takalar berada pada tingkat menengah.

Table 2.1
 IPM Kabupaten Takalar Tahun 2021-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar			
2021	2022	2023	2024
70,25	70,86	71,46	72,06

Sumber: BPS Publikasi Takalar Dalam Angka 2024.

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan menurut World Bank (2000) didefinisikan sebagai, “poverty is pronounced deprivation in well-being” yang bermakna kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan. Sehingga menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran inilah disebut sebagai Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan (GK) merupakan batasan pengelompokan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS).

Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Takalar dalam 5 (lima) tahun terakhir setiap tahunnya mengalami penurunan.

Jumlah Penduduk miskin dan Angka Kemiskinan di Kabupaten Takalar dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Miskin Dan Angka Kemiskinan di Kabupaten Takalar Tahun 2021-2024

No	Tahun	Penduduk Miskin	
		Jumlah Penduduk (ribu)	Angka Kemiskinan (%)
1.	2021	24,60	8,25
2.	2022	24,75	8,25
3.	2023	25,01	8,29
4.	2024	23,51	7,75

Sumber: BPS Publikasi Takalar Dalam Angka 2025

c. Angka Pengangguran.

Rendahnya pengangguran merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu wilayah/daerah. Semakin rendah pengangguran mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan. Untuk mengetahui hal tersebut dapat digunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Takalar dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Takalar Tahun 2021-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
2021	2022	2023	2024
3,93	2,63	3,58	3,84

Sumber: Takalar Dalam Angka, 2025.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebesar -0,61 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, yakni 5,05 persen pada tahun 2021, 4,64 persen pada tahun 2022, 3,86 persen pada tahun 2023, dan 4,34 pada tahun 2024.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar/ Economic Growth (persen), Tahun 2021–2023

Pemerintah Kabupaten Takalar

Laju Pertumbuhan Ekonomi / Economic Growth			
2021	2022	2023	2024
5,05	4,64	3,86	4,34

Sumber : BPS Publikasi Takalar Dalam Angka 2024/ 2025.

Tabel. 2.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Takalar (persen),
2022–2024

Lapangan Usaha	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,52	3,80	3,74
Pertambangan dan Penggalian	2,53	7,15	1,52
Industri Pengolahan	8,64	2,99	4,12
Pengadaan Listrik dan Gas	1,86	4,37	2,36
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,76	3,80	4,30
Konstruksi	5,03	5,06	2,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	5,61	4,45	5,32
Transportasi dan Pergudangan	7,33	5,08	6,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,59	7,52	7,06
Informasi dan Komunikasi	5,42	6,48	6,45
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	-2,08	1,40
Real Estate	5,84	5,94	5,84
Jasa Perusahaan	8,96	9,02	1,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,85	-2,78	4,25
Jasa Pendidikan	2,04	5,13	7,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,72	7,62	5,58
Jasa lainnya	6,66	10,37	14,37

Pemerintah Kabupaten Takalar

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,64	3,86	4,34
---------------------------------------	-------------	------	-------------

Sumber : BPS Publikasi Takalar Dalam Angka 2025

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Takalar di tahun 2022 4,64%. Tahun 2023 kembali menurun ke angka 3,86% dan kembali meningkat ke angka 4,34%.

Distribusi PDRB kabupaten Takalar atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Takalar
(miliar rupiah), 2021–2023

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5 320,33	6.530,13	6.660,66
Pertambangan dan Penggalian	208,08	229,29	232,73
Industri Pengolahan	604,13	639,11	686,99
Pengadaan Listrik dan Gas	12,86	13,83	14,76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,29	5,54	5,80
Konstruksi	865,43	939,05	973,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1 475,83	1.601,04	1.722,77
Transportasi dan Pergudangan	314,71	357,45	389,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37,08	40,96	44,67
Informasi dan Komunikasi	455,91	490,50	526,06
Jasa Keuangan dan Asuransi	214,10	212,76	217,56
Real Estate	595,75	639,89	690,42
Jasa Perusahaan	0,67	0,77	0,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	788,53	776,95	831,50
Jasa Pendidikan	152,71	164,37	183,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,00	197,62	212,65
Jasa lainnya	25,64	29,12	33,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	12 257,05	12.868,38	13.428,09

Sumber : BPS Publikasi Takalar Dalam Angka 2025

e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata per tahun penduduk di suatu negara atau di suatu daerah yang menjadi sebuah tolak ukur untuk tingkat kesejahteraan dan pembangunan. Pendapatan per kapita merefleksikan PDRB per kapita untuk mencapai nominal pendapatan per kapita atau PDRB per kapita.

Nilai PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Besarnya nilai PDRB suatu daerah belum mencerminkan tingginya PDRB per kapita daerah tersebut. Walaupun demikian nilai tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita dapat kita dalam Tabel berikut :

Tabel 2.7
PDRB Per Kapita Tahun 2021-2023

PDRB PER KAPITA (juta rupiah)	TAHUN		
	2022	2023	2024
PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)	40,18	41,14	42,36

Sumber : BPS Publikasi Takalar Dalam Angka 2025.

f. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat dan dapat menyebabkan pemenuhan kebutuhan pokok semakin kecil.

Ketimpangan pendapatan yang tinggi dan semakin meningkat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat mengakibatkan konflik sosial, bahkan sampai kepada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketimpangan pendapatan ini dapat diukur dengan indeks gini ratio.

Gini ratio kabupaten takalar dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.8
Gini Ratio Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023

KABUPATEN/KOTA	Gini Ratio		
	Tahun		
	2022	2023	2023
Kabupaten Takalar	0,375	0,365	0,365

Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulsel Triwulan IV 2024

Pemerintah Kabupaten Takalar

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	80,5720538	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,5702388	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,7156704	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	21,6954393	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Saki Rujukan	1,4788013	BLUD RSUD H. Padjonga Dg Ngalle	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	BLUD RSUD H. Padjonga Dg Ngalle	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,0922778	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	89,348711	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,5181753	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92,9905288	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,5485841	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	79,810748	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77,4621587	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54,4169975	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,2819002	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	90,8440629	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	55,1351351	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	36,1140351	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	23,2378606	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,2211838	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98,128056	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	63,4587602	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

					Takalar	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	2,1126761	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	
		3	dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar Umum,	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,8149854	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pekerjaan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Takalar	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Takalar	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Takalar	Tidak ada Kegiatan Surat Keterangan Terlampir
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,0583347	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Takalar	Jumlah Peserta Pelatihan pada Tahun 2021
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	3,6458333	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Takalar	
		6	Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Evaluasi Korban Kebakaran	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	

Pemerintah Kabupaten Takalar

					Kebakaran Kab.Takalar	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Takalar	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	4,0135823	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Takalar	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Takalar	
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas PM, PTSP, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100	Dinas PM, PTSP, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas PM, PTSP, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	91,6	Dinas PM, PTSP, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas PM, PTSP, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Takalar	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	10 Korban -----x100% = 0,011% 93299 Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Takalar	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Takalar	
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Lingkungan dan Hidup Pertanahan Kab. Takalar	Surat Keterangan Terlampir
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Lingkungan dan Hidup Pertanahan Kab. Takalar	Surat Keterangan Terlampir
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Lingkungan dan Hidup Pertanahan Kab. Takalar	Surat Keterangan Terlampir
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Lingkungan dan Hidup Pertanahan Kab. Takalar	Surat Keterangan Terlampir
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Lingkungan dan Hidup Pertanahan Kab. Takalar	Surat Keterangan Terlampir
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Takalar	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota		Dinas Lingkungan dan Hidup Pertanahan Kab. Takalar	Data Passive Sampler

Pemerintah Kabupaten Takalar

		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Lingkungan dan Hidup Pertanahan Kab. Takalar	Profil TPA Balang dan Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Lingkungan dan Hidup Pertanahan Kab. Takalar	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP-el	99,3226494	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar	
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	90,0523944	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	120	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Takalar	
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	156	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Takalar	14 : 58 x 100 = 24,138%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)		Dinas Kesehatan Kab. Takalar	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Takalar	
		3	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Takalar	
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kab/Kota		Dinas Perhubungan Kab. Takalar	
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		Dinas Perhubungan Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Takalar	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Takalar	
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Takalar	
17	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	11,9133574	Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kab. Takalar	
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	15,401744	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Takalar	
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	47,9514594	Dinas PM, PTSP, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga Kab. Takalar	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Takalar	
		3	Peningkatan prestasi olahraga		Dinas Pariwisata, Dan Pemuda	

Pemerintah Kabupaten Takalar

					Olahraga Kab. Takalar	
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Komunikasidan Informatika Kab. Takalar	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Komunikasidan Informatika Kab. Takalar	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Komunikasidan Informatika Kab. Takalar	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	6,7567568	Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kab. Takalar	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	62,73	Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Kab. Takalar	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	75,44	Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Kab. Takalar	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	55,67	Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	9,17	Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Kab. Takalar	
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	100,6356462	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pariwisata, dan Pemuda Olahraga Kab. Takalar	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pariwisata, dan Pemuda Olahraga Kab. Takalar	
		3	Tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pariwisata, dan Pemuda Olahraga Kab. Takalar	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pariwisata, dan Pemuda Olahraga Kab. Takalar	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Pariwisata, dan Pemuda Olahraga Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,1269119	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Takalar	
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	80,7017544	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Takalar	
28	Kehutanan		Tidak ada Outcome	Tidak ada Outcome	Dinas Kehutanan Wil. Cabang Takalar Provinsi Sulawesi Selatan	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas PM, PTSP, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar	
30	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kab. Takalar	
		2	Persentase kinerja pupuk	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kab. Takalar	
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0,4763417	Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kab. Takalar	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1	Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kab. Takalar	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kab. Takalar	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kab. Takalar	Surat Keterangan Terlampir
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kab. Takalar	Surat Keterangan Terlampir
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kab. Takalar	Surat Keterangan Terlampir
32	Transmigrasi		Tidak Ada Outcome	Tidak Ada Outcome	Dinas PM, PTSP, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	FUNGSI PENUNJANG	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perencanaan keuangan	1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	21,19745	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar	
		2	Rasio PAD	12,1398127	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	Inspektorat Daerah Kab. Takalar	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat Daerah Kab. Takalar	Surat Keterangan
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	39,4458621	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

ke		6	Opini Laporan Keuangan	3	Inspektorat Daerah Kab. Takalar	Bukti Surat Keterangan
2	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Takalar	
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Takalar	
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Takalar	
3	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,4827586	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Takalar	
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Takalar	
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Takalar	

Pemerintah Kabupaten Takalar

4	Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	7,6469	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	40,0555	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar	
		3	Assets Management	1. Apakah Ada Daftar Asset Tetap ? Ya 2. Apakah Ada Manual Untuk	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar	
				Menyusun Daftar Asset Tetap ? Ya 3. Apakah Ada Proses Inventarisasi Asset Tahunan ? Ya 4. Apakah Nilai Asset Tercantum dalam laporan Anggaran ? Ya		
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,9726884	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar	
5	Transparansi Dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	94,9320293	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menginformasikan dan mempertanggungjawabkan capaian keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran secara terukur yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara berkala.

Adapun penjabaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

a. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan perjanjian kinerja.

Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang.

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan perjanjian kinerja pemerintah Kabupaten Takalar dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel II.9
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MANUSIA				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	138,6	BRIN (Buku Indeks Daya Saing Daerah 2024)
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	103,4	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024
SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA DAYA SAING INFRASTRUKTUR				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	12,75	BRIN (Buku Indeks Daya Saing Daerah 2024)
SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS DAN PENYERAPAN TENAGAKERJA SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1.	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	124,33	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024
2	Rasio Gini	Angka	90	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	75,08	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024

SASARAN STRATEGIS 4 BERKURANGNYA PENDUDUK MISKIN				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	103,03	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024
2	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	Persen	87,67	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024
SASARAN STRATEGIS 5 TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	113,8	Profil Kualitas Lingkungan Hidup (Kementerian Lingkungan Hidup)
SASARAN STRATEGIS 6 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92,24	Bagian Organisasi Setda Kab. Takalar(LHE KemenPan RB)
2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	100	Bagian Organisasi Setda Kab. Takalar(LHE KemenPan RB)
SASARAN STRATEGIS 7 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Indeks Kepuasan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	109,85	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Takalar
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100	Bappelitbangda Kab. Takalar
SASARAN 8 TERPELIHARANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	177,68	Satpol PP dan Damkar Kab. Takalar

Sumber : LKJIP 2024 Pemerintah Kab. Takalar.

b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II. 10
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	
		2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	Persen	131	138,6
Indeks Pembangunan Manusia	Persen	104	103,4
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	10,934	12,75
PDRB/Kapita	Juta Rupiah	121	124,33
Rasio Gini	Angka	92,86	90
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	72,83	75,08
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	110,5	103,03
Persentase Penduduk di bawah garis Kemiskinan	Persen	83,07	87,67
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	110,5	103,03
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	73	92,24
Nilai SAKIP Daerah	Predikat	97	100
Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	110,5	109,85
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,07	100
Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.00 Penduduk	175,7	177,68

Sumber : LKJIP 2024 Pemerintah Kab. Takalar

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran capaian target kinerja pemerintah Kabupaten Takalar yang dibandingkan dengan target kinerja yang tercantum dalam RPD 2023-2026 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.12
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Mengah

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun	Capaian (%)
-------------------	--------	------------------------	---	-------------

Pemerintah Kabupaten Takalar

		Jangka Menengah	ini	
Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,453	3,305	134,73
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,7	71,76	102,96
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29,178	3,46	11,85
PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,07	41,75	122,54
Rasio Gini	Angka	0,35	0,38	91,43
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04 – 6,52	4,1	68,79
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	3,84	100,52	100,52
Persentase Penduduk di bawah garis Kemiskinan	6,60%	7,75%	82,57	82,57
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,14	67,21	113,65
Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	70-80	88,09	117,45
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	Baik
Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.00 Penduduk	89,41	21,13	176,37

Sumber : LKJIP 2024 Pemerintah Kab. Takalar

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - (\text{Realisasi Biaya} : \text{Target Biaya} \times 100\%)$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program kegiatan sebesar Rp.1.174.764.040.721,81 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.1.244.132.362.335,46. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase biaya pada level program adalah **5,6%** dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 69.368.321.613,65,-

$$\begin{aligned} \text{Persentase Efisiensi biaya} &= 100\% - ((1.174.764.040.721,81 : 1.244.132.362.335,46)100\%) \\ &= 5,6\% \end{aligned}$$

Sumber : LKJIP 2024 Pemerintah Kab. Takalar

BAB IV

CAPAIAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan sendiri Urusan Pemerintahan, melimpahkan kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi, atau menugasi daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Tugas Pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah. Tugas Pembantuan dilakukan antara lain ketika terdapat kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya berada atau berlokasi di daerah, sementara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memandang tidak efisien dibentuk instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut.

Tahun 2024, Kabupaten Takalar tidak menerima tugas pembantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2023, kabupaten Takalar menerima tugas pembantuan dan penugasan dari Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Takalar untuk Pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2023.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah dan berhak diperoleh warga negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini diatur secara teknis dalam ketentuan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten menerapkan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

A. PENDIDIKAN

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		7125	7125	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	7125	7125	0	100.00 %
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang	%	7125	7125	0	100.00 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	mendapatkan minimal akreditasi B					
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	7125	7125	0	100.00 %
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	7125	7125	0	100.00 %
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	7125	7125	0	100.00 %
	6 . Indeks distribusi guru	%	7125	7125	0	100.00 %
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	7125	7125	0	100.00 %
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	7125	7125	0	100.00 %
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	7125	7125	0	100.00 %
2 .	Pendidikan Dasar					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		44802	44802	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	SD					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	32314	32314	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	25216	25216	0	100.00 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	586	586	0	100.00 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	182	182	0	100.00 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	2009	2009	0	100.00 %
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	25216	25216	0	100.00 %
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	586	586	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	71	71	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	71	71	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	586	586	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	586	586	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	586	586	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	586	586	0	100.00 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	586	586	0	100.00 %
	SMP					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	12839	12839	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	12839	12839	0	100.00 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	12839	12839	0	100.00 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	8739	8739	0	100.00 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	8739	8739	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	8739	8739	0	100.00 %
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	8739	8739	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	8739	8739	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	8739	8739	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	8739	8739	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	8739	8739	0	100.00 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	8739	8739	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	8739	8739	0	100.00 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	8739	8739	0	100.00 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1159	1159	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	715	715	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	45	45	0	100.00 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	1159	1159	0	100.00 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	163	163	0	100.00 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	45	45	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	102	102	0	100.00 %
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1159	1159	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	9	9	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	9	9	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	9	9	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	9	9	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK	%	9	9	0	100.00 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	bersertifikat					
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	9	9	0	100.00 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	9	9	0	100.00 %

B. KESEHATAN

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1		-2				-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			79.91 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					90.02 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71.54 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	6,428	5,748	680	89%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.48 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	92.40 %
			-1	-2	-3	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	4,432	4,144	288	93.50 %
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	447,323	359,324	87,999	80.33 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	6,402	6,049	353	94.49 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	6,937	6,595	342	95.07 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	6,088	5,25	838	86.24 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	6,451	6,075	376	94.17 %
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6,402	6,07	332	94.81 %
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6,402	5,853	549	91.42 %
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	31	31	0	100.00 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	182	173	9	95.05 %
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	33	30	3	90.91 %
	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	5,918	5,489	429	92.75 %
	JUMLAH	496,601	405,083	91,518	1,108.74 %	
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					91.65 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.84 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	6,133	5,661	472	92%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.81 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	89.05 %
	1 . Formulir Partograf	Formulir	6,101	5,221	880	85.58 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	6,115	5,221	894	85.38 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6,115	5,168	947	84.51 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	30	29	1	96.67 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	183	167	16	91.26 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	33	30	3	90.91 %
	JUMLAH	18,577	15,836	2,741	534.31 %	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					94.15 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.08 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5,844	5,558	286	95%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.06 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
						90.31 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

			-1	-2	-3	
1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin		5,87	5,143	727	87.61 %
2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul		5,87	5,148	722	87.70 %
3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang		5,87	5,148	722	87.70 %
4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir		5,87	5,148	722	87.70 %
5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang		5,87	4,87	1	82.96 %
6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		5,939	5,746	193	96.75 %
7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang		30	29	1	96.67 %
8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		183	174	9	95.08 %
9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		32	29	3	90.63 %
JUMLAH	35,534		31,435	4,099	812.80 %	
4 . Pelayanan Kesehatan Balita						73.14 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	58.46 %
• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang		32,228	23,551	8,677	73%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						14.68 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	73.41 %
1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen		18,414	9,356	9,058	50.81 %
2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir		18,23	10,936	7,294	59.99 %
3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku		23,213	20,97	2,243	90.34 %
4 . Vitamin A Biru	Kapsul		6,811	4,896	1,915	71.88 %
5 . Vitamin A Merah	Kapsul		31,399	29,209	2,19	93.03 %
6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin		6,533	4,189	2,344	64.12 %
7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin		8,601	3,915	4,686	45.52 %
8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang		10,601	7,098	3,503	66.96 %
9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin		8,343	3,807	4,536	45.63 %
10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	Vaksin		9,908	5,731	4,177	57.84 %
11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin		8,347	4,353	3,994	52.15 %
12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin		8,419	7,336	1,083	87.14 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	7,543	3,236	4,307	42.90 %
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	8,358	7,432	926	88.92 %
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	9,905	6,755	3,15	68.20 %
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	35,142	26,537	8,605	75.51 %
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	69	47	22	68.12 %
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	26	26	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	138	130	8	94.20 %
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	50	47	3	94.00 %
	21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	28	28	0	100.00 %
	22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	522	510	12	97.70 %
	22 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	142	142	0	100.00 %
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					91.34 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.55 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	43,356	42,57	786	98%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.79 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	63.95 %
			-1	-2	-3	
	1 . Buku raport kesehatanku	Buku	24,028	6,516	17,512	27.12 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	19,345	6,515	12,83	33.68 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	54,074	12,959	41,115	23.97 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	9,949	3,549	6,4	35.67 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	7,204	2,724	4,48	37.81 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	25	25	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	57	48	9	84.21 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	39	3	92.86 %
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	22	22	0	100.00 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	10	9	1	90.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	270	211	59	78.15 %
	11 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	227	185	42	81.50 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					72.96 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	63.11 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	196,171	154,756	41,415	79%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					9.85 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	49.25 %
			-1	-2	-3	
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12,527	2,679	9,848	21.39 %
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	7,863	49	7,814	0.62 %
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	7,862	48	7,814	0.61 %
	4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	7,866	52	7,814	0.66 %
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	7,864	50	7,814	0.64 %
	6 . Alat : Glukometer	Unit	7,881	940	6,941	11.93 %
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	196,171	87,612	108,559	44.66 %
	8 . Alat : Lancet	Unit	196,171	92,585	103,586	47.20 %
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	196,171	86,078	110,093	43.88 %
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	23,114	13,664	9,45	59.12 %
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	17	17	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23	23	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	69	53	16	76.81 %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	50	44	6	88.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	16	15	1	93.75 %
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	13	11	2	84.62 %
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	93	59	34	63.44 %
	JUMLAH	663,771	283,979	379,792	837.33 %	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					74.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN		Jumlah	Jumlah	Yang	64.11 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Belum Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	28,642	22,952	5,69	80%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						10.56 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	52.82 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	37,792	19,796	17,996	52.38 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	15,914	1,351	14,563	8.49 %
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	17,468	2,618	14,85	14.99 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	20	19	1	95.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	31	21	10	67.74 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	38	34	4	89.47 %
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	19	11	8	57.89 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	11	8	3	72.73 %
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	36	6	30	16.67 %
	JUMLAH	71,329	23,864	47,465	475.36 %	
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					51.95 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	38.77 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	67,451	32,686	34,765	48%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						13.19 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	65.93 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi,	Pedoman	3,933	723	3,21	18.38 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	Informasi, Edukasi (KIE)					
	2 . Tensimeter	Unit	75	45	30	60.00 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	12,618	754	11,864	5.98 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	26	23	3	88.46 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	60	51	9	85.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	50	44	6	88.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	13	11	2	84.62 %
	8 . Obat Hipertensi	Paket	18,058	17,512	546	96.98 %
	JUMLAH	34,833	19,163	15,67	527.42 %	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					97.39 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.39 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5,387	5,211	176	97%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	100.00 %
	1 . Alat : Glukometer	Unit	291	65	226	22.34 %
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	5,387	25,391	-20,004	471.34 %
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit	30,744	30,384	360	98.83 %
	4 . Alat : Lancet	Unit	24,25	23,89	360	98.52 %
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,824	476	1,348	26.10 %
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	723	136	587	18.81 %
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23	22	1	95.65 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	61	45	16	73.77 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	50	44	6	88.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	14	13	1	92.86 %
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	12	10	2	83.33 %
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	3,455	3,119	336	90.27 %
	JUMLAH	66,834	83,595	-16,761	1,259.82 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					82.44 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.17 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	736	664	72	90%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10.26 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	51.32 %
			-1	-2	-3	
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	62	14	48	22.58 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	129	8	121	6.20 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	2,053	1,587	466	77.30 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	308	56	252	18.18 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	22	22	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	20	17	3	85.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	20	10	10	50.00 %
	JUMLAH	2,614	1,714	900	359.26 %	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					49.71 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	38.56 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	11,41	5,5	5,91	48%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					11.15 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	55.76 %
			-1	-2	-3	

Pemerintah Kabupaten Takalar

1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	2,095	91	2,004	4.34 %
2 . Reagen Zn TB	Paket	2,298	312	1,986	13.58 %
3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	5,147	1,601	3,546	31.11 %
4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	10,254	7,035	3,219	68.61 %
5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	2,283	1,024	1,259	44.85 %
6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	2,636	1,036	1,6	39.30 %
7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1,05	219	831	20.86 %
8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	21	20	1	95.24 %
9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	35	32	3	91.43 %
10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	28	28	0	100.00 %
11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	1	1	0	100.00 %
12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	9	8	1	88.89 %
13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	45	12	33	26.67 %
JUMLAH	25,902	11,419	14,483	724.88 %	
12 . Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					89.47 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.30 %
• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	7,504	7,063	441	94%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.17 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	70.85 %
		-1	-2	-3	
1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	1,573	132	1,441	8.39 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	7,717	6,574	1,143	85.19 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	7,885	6,76	1,125	85.73 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	5,669	4,579	1,09	80.77 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	20	19	1	95.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	28	24	4	85.71 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	33	23	10	69.70 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	19	19	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	10	8	2	80.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	50	9	41	18.00 %

C. PEKERJAAN UMUM

Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			95.97 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					98.34 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.34 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	89,106	87,261	1,845	98%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	1	1	0	100.00 %
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	1	1	0	100.00 %
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	1	1	0	100.00 %
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	70	56	14	80.00 %
	JUMLAH	73	59	14	380.00 %	
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					93.59 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.59 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	89,106	81,969	7,137	92%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	100.00 %
1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga		1	1	0	100.00 %
1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga		1	1	0	100.00 %
1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga		275	275	0	100.00 %
1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga		1	1	0	100.00 %
1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk	Rumah Tangga		1	1	0	100.00 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	>25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)					
	JUMLAH	279	279	0	500.00 %	

D. PERUMAHAN RAKYAT

Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3	3	0		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %	
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	3	3	0	100.00 %	
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %	
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %	
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				(100%)	100.00 %	
	Ada Relokasi Program Pemerintah						7305

Pemerintah Kabupaten Takalar

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%		
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	1	0	1	100.00%	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					(20%)	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						100.00 %	

E. TRANTIBUMLINMAS

Realisasi Pencapaian SPM Trantibumlinmas Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						96.51 %	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					96.51 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%)	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	311.316	311.316	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					(20%)	16.51 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						82.56 %	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara	Unit	23	23	0	100.00 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

(jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)						
<p>2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)</p>	Dokumen	6	6	0	100.00 %	
<p>3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)</p>	Orang	65	62	3	95.38 %	
<p>4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal</p>	Dokumen	1	1	0	0.00 %	
<p>5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)</p>	Orang	0	0	0	100.00 %	
<p>6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat</p>	Orang	0	0	0	100.00 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

	kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)						
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					11.00 %	
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					10.99 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	9.20 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	311316	35796	275520	11.50 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	1.79 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					8.94 %	
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	10	0	10	0.00 %	
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload						
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	100000	35613	64387	35.61 %	
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	311316	397	310919	0.13 %	
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	110	0	110	0.00 %	
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					10.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	0.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	311316	0	311316	0.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	10.00 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					50.00 %	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	59	0	59	0.00 %	
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	41	41	0	100.00 %	
	3 . Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					12.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	552	0	552	0.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	12.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					60.00 %	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %	
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	8	0	8	0.00 %	
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	1	1	0	100.00 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

	(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)						
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %	
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	3	0	3	0.00 %	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						100.00 %	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%)	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	311.316	311.316	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	147	147	0	100.00 %	
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	9	9	0	100.00 %	
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm	Unit	9	9	0	100.00 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

	petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)						
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	107	107	0	100.00 %	
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	100.00 %	
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	0	100.00 %	

F. SOSIAL

Realisasi Pencapaian SPM Sosial Kabupaten Takalar
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					84.61 %	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					45.23 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	25.23 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2670	842	1828	31.54 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
1 .	Layanan data dan pengaduan	Orang	20	20	0	100.00 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

	layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial						
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	50	50	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	13	13	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)							
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	280	280	0	100.00 %		
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %		
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	280	280	0	100.00 %		
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %		
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100.00 %		
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	9	9	0	100.00 %		
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pant						93.20 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		73.20 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17325	15853	1472	91.50 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	97	97	0		100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	1	1	0		100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	50	50	0		100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1	1	0		100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	280	380	-100		100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0		100.00 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	280	280	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	8	8	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	280	280	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	126	126	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					84.62 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	64.92 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9488	7699	1789	81.14 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.71 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.54 %
1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	9488	7688	1800	81.03 %
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	300	300	0	100.00 %
3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1	1	0	100.00 %
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1	1	0	100.00 %
5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	1	1	0	100.00 %
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)						
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	4	1	3	100.00 %	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1	1	0	100.00 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
<p>1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial</p>	Orang	1	1	0	100.00 %	
<p>2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis</p>	Orang	1	1	0	100.00 %	
<p>3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)</p>	Orang	1	1	0	100.00 %	
<p>4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</p>	Orang	1	1	0	100.00 %	
<p>5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</p>	Orang	1	1	0	100.00 %	
<p>6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial</p>	Orang	1	1	0	100.00 %	

Pemerintah Kabupaten Takalar

	<p>bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)</p>					
	<p>7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis</p> <p>(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)</p>	Orang	1	1	0	100.00 %
	<p>8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan</p>	Orang	1	1	0	100.00 %
	<p>9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p> <p>(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)</p>	Orang	1	1	0	100.00 %
	<p>10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)</p>	Orang	1	1	0	100.00 %
	<p>11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga</p> <p>(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)</p>	Orang	1	1	0	100.00 %
	<p>12 . Layanan rujukan</p> <p>(layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)</p>	Orang	1	1	0	100.00 %

Pemerintah Kabupaten Takalar

5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	788	788	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	257	257	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	257	257	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	11	11	0	100.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	257	257	0	100.00 %	

BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

LPPD tahun 2024 Kabupaten Takalar memuat hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas: Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: capaian kinerja makro dan capaian kinerja mikro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Takalar mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen atas capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama Tahun 2024. Capaian kinerja pembangunan Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 tidak lepas dari dukungan DPRD, Jaringan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar termasuk Pemerintah Desa, Seluruh Stakeholder pembangunan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Takalar yang telah mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan jalannya Pemerintahan hingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran, kritik dan rekomendasi konstruktif dari berbagai pihak, sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam upaya perbaikan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun berikutnya.